

**ANALISIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BAJAWA
PROVINSI NTT NOMOR.32/PID.B/2002 TENTANG PENODAAN AGAMA**

Jurnal Ilmiah

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

IBBAT KHALIQAH SAPULANGGA

NIM: 0610113114



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**ANALISIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BAJAWA
PROVINSI NTT NOMOR.32/PID.B/2002 TENTANG PENODAAN AGAMA**

Ibbat Khaliqah Sapulangga

Fakultas Hukum, Universitas Brawijawa Malang

Email: sapulangga24@ymail.com

RINGKASAN

Indonesia adalah bangsa yang mejemuk, hal ini disebabkan oleh karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, dan bahasa daerah, serta berbagai keyakinan kepercayaan yang ada dan hidup damai berdampingan di Indonesia bahkan sebelum berdirinya Republik Indonesia. Sejak era reformasi mulai maraknya muncul kasus-kasus penyimpangan di masyarakat, salah satunya adalah mulai maraknya tindak pidana penodaan agama dalam berbagai bentuk, seperti munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan beragama dalam masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama yang telah ada. Hal-hal tersebut dapat merongrong sendi-sendi kehidupan beragama masyarakat yang telah ada.

Dalam perkara ini terdakwa di dakwaan dengan dua tuntutan yang pertama melanggar pasal IV ayat 1 UU no.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan dakwaan kedua melanggar Pasal 156 huruf a KUHP, setelah menjalani proses persidangan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimaimana hasil persidangan dari kasus no.32/pid.b/2002/Pn.Bajawatentang tindak pidana penodaan agama dengan cara menganalisis unsur-unsur dakwaan pasal 156 huruf a KUHP apakah telah terbukti dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang di rugikan.

Kata kunci: Penodaan agama, Pasal 156 huruf a KUHP.

ABSTRACT

Indonesia is a pluralistic nation. Its because indonesia consist of so many ethnic race, language, and so many religion that lived together even before indonesia was born Since reformation era there are so many deviation case, one of them was blasphemy casi in many situation such as deviation in religious life. This may damage the inter-religiou harmony in the society.

One of the cases that will be analyzed by the author in the context of the preparation of this thesis is the case no.32/pid.b/2002 about blasphemy. In this case malefactor Liaw Tek Hay a.k.a Slamet Hariady who has muslim identity do desecratio of the hosti that for the catholic is the most holy sacrament. Hosti denoted as the body an blood of Jesus Christ. The impact of this case cause of disharmony among the inter religion life in Bajawa.

In this case the defendant was charged with two counts. The first is violate article IV verse 1 UU no.1 1946 on criminal law. And the second is violate article 156 letter a KUHP. After trial, judge ruled imprisonment for 7 years.

The purpose of this study is to know how the result of the trial of the case no.32/pid.b/2002/Pn.Bajawa about criminal offense of blasphemy and way to analyse elements of indictment article 156 letter a KUHP, whether it has been proven and sense of justice for disadvantaged communities.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang ditunjukkan oleh adanya berbagai macam suku bangsa, ras, dan bahasa daerah, serta berbagai keyakinan kepercayaan yang dianut oleh masyarkat Indonesia. Dan beberapa faktor tersebut merupakan hal yang sangat kritis dalam kehidupan masyarakat Indonesia, apalagi yang berkaitan dengan agama atau aliran kepercayaan yang dianut masyarakat.Indonesia bukanlah negara agama, sebab negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi 6 agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan

Khonghucu. Sejak era reformasi mulai marak kasus-kasus penodaan agama yang muncul di masyarakat. Salah satu kasus penodaan yang terjadi adalah kasus no.32/pid.b/2002 di Pengadilan Negeri Bajawa, kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan pencemaran Hosti¹ yang dilakukan oleh Liaw Tek Hay alias Slamet Hariady. Terdakwa mengaku beragama Kong Hu Chu, namun berdasarkan KTP Bergama Islam. Terdakwa mengakui di Surabaya susah untuk mendapatkan KTP beragama Kong Hu Chu. Dengan berkedok KTP beragama Islam itu terdakwa pergi ke Bajawa untuk menjual barang dagangan. Dimana kasus ini menimbulkan berbagai keributan di kota Bajawa yang merupakan ibukota dari kabupaten Ngada, berupa tindakan anarkis oleh sekelompok masyarakat yang ditunjukan oleh pengrusakan dan penghancuran berbagai bangunan milik masyarakat non kristiani khususnya penduduk yang beragama islam. Selain itu kasus ini menimbulkan rasa takut dan kecemasan bagi penduduk yang beragama non kristiani yang berdomisili di kota Bajawa. Kasus no.32/pid.b/2002 di Pengadilan Negeri Bajawa yang dibeberkan diatas merupakan salah satu bentuk perbuatan yang menodai suatu agama namun membutuhkan penafsiran yang lebih mendalam yang berkaitan dengan penggunaan pasal 156a KUHP dimana perlu diperjelas dan dipertegasnya perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, ataupun material-material yang bersifat sakral dalam proses keagamaan.

MASALAH

1. Apakah putusan perkara no.32/pid.b/2002 dalam kasus penodaan agama sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 156a KUHP?
2. Apakah pidana dalam putusan perkara no.32/pid.b/2002 sudah memenuhi rasa keadilan?

¹ Hosti adalah roti tanpa ragi yang biasa digunakan dalam perayaan ekaristi (sumber : KKBI).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.² Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penulis kemudian akan mengkaji apakah putusan Pengadilan negeri no.32/pid.b/2002 telah sesuai dengan ketentuan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Johnny Ibrahim, suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian³. Teknik pengumpulan bahan hukum, Adapun teknik yang dipakai yaitu dengan cara mengutip baik secara langsung maupun paraphrase atau kutipan yang sumbernya tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide atau gagasan yang terdapat dalam sumber aslinya⁴. Teknik analisa bahan hukum, Bahan hukum atau non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis. Menurut P.W.C Akkerman seperti yang dikutip oleh Peter Mahmud, interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.⁵ Disamping itu juga harus di lihat bahwa hubungan itu tidak bersifat teknis, melainkan juga harus dilihat asas-asas atau dasar hukum yang melandasinya.

²Peter Mamud marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; kencana , 2005, hal. 35

³Jonny Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normative*, Malang: bayu Media, 2005, hal.248

⁴ Ibid, hal.33

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit* hal.112

PEMBAHASAN

A. Realitas Putusan Hakim Perkara No.32/PID.B/2002 Tentang Penodaan Agama

1. Deskripsi Kasus

Kejadiannya bermula pada hari minggu tanggal 17 maret 2002 sekitar pukul 09.15 Wita. Terdakwa Liaw Tek Hay alias Slamet Hariady mengikuti kegiatan keibadatan umat katolik misa kudus di Gereja Santo Josef Bajawa, kemudian terdakwa melakukan perbuatan yang tidak semestinya atau tidak sebenarnya dilakukan dalam tatacara penerimaan Hosti kudus atau terdakwa melakukan sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama Kristen Katolik yaitu dengan menyembunyikan hosti dalam pakaiannya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi umat Katolik yang lainnya yang mengikuti upacara keibadatan tersebut dan setelah diamati lebih lanjut ternyata terdakwa kemudian membuangnya ketika berada di luar lingkungan Gereja. Akibat perbuatan terdakwa diatas, mengakibatkan semua umat Katolik merasa tersinggung dan menganggap terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap agama Katolik, apalagi di ketahui terdakwa beragama Kong Hu Cu dan memiliki tanda pengenal beragama Islam yang seharusnya berdasarkan peraturan bahwa selain umat yang beragama katolik masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengikuti misa kudus dan memperoleh Hosti. Perbuatannya menimbulkan amarah umat Katolik di Kota Bajawa sehingga menimbulkan keributan yang sangat besar, dimana masyarakat kab.Ngada yang beragama katolik melempar, merusak berbagai properti masyarakat yang pemiliknya beragama Islam sehingga umat Islam lainnya yang berada di Bajawa merasa ketakutan akibat amukan masa tersebut.

2. Identitas Terdakwa

Terdakwautama adalah Liauw Tek Hay alias Slamet Haryadi yang lahir di Surabaya pada tanggal 10 agustus 1954, berumur 47 tahun. dengan berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia. Alamat tempat tinggal terdakwa yaitu RT.04/RW.03 Kel. Kedung Baruk Kec Rungkut Kodya Surabaya. Terdakwa diketahui beragama Kong Hu Chu, namun berdasarkan KTP tertulis bahwa terdakwa beragama Islam.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dakwaan pertama melanggar pasal XIV ayat (1) Undang-undang no.1 tahun 1946 dan dakwaan kedua melanggar ketentuan pasal 156 huruf a KUHP.

4. Putusan Pengadilan Negeri Bajawa

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan ternyata benar terdakwa Liaw Tek Hay alias Slamet Hariady telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat dan dengan sengaja dimuka umum melakukan perbuatan penodaan salah satu agama di Indonesia. Dengan demikian majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Liaw Tek Hay alias Slamet Hariady dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

B. Analisa Putusan Perkara No.32/Pid.B/2002 Terkait Penerpan Pasal 156 Huruf a KUHP

1. Analisis Unsur-Unsur Dalam Putusan Perkara No.32/Pid.B/2002 Pn.Bajawa

a. Pasal XIV ayat (1) undang-undang no.1 tahun 1946

Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

1) Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subjek hukum yaitu manusia atau orang selaku pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana dan terhadapnya mampu dipertanggungjawabkan. Dalam perkara ini yang telah diajukan di muka persidangan adalah terdakwa Liaw Tek Hay alias Slamet Hariady sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dengan demikian unsur kedua dan surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.

2) Unsur menyiarkan berita atau pemberitaan bohong

Dalam penjelasan pasal XIV undang-undang no.1 tahun 1946 yang dimaksudkan dengan kata menyiarkan sama artinya dengan “*Verpreisden*”. Menurut KUHP menyiarkan (*verspreiden*) melakukan perbuatan dengan menyebarkan sesuatu (objek tindak pidana) kepada umum sehingga sesuatu tersebut diketahui oleh orang banyak (umum). Oleh karena tidak disebutkan caranya menyiarkan, maka cara tersebut harus disesuaikan dengan sifat objek dan wadah objek yang disiarkan. Berdasarkan pengertian yang demikian, maka sesungguhnya *verpspreiden* lebih tepat dibahasa Indonesiakan dengan menyebarkan dari pada menyiarkan.⁶ Maka penyebaran berita bohong adalah menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan sebenarnya. Dalam persidangan keterangan terdakwa bahwa benar agama Islam yang tertulis dalam

⁶Dikutip dari blog Drs. Adami Chazawi, S.H “*Penghinaan khusus dalam undang-undang Penyiaran*”

KTP hanya karena untuk memudahkan mendapatkan KTP untuk memudahkan mendapatkan KTP di Surabaya, apabila dengan menggunakan agama Katolik atau Kristen Protestan sering ditanya surat permandiannya apalagi beragama Kong Hu Chu tidak bisa di cantumkan dalam KTP sebagai agama. Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa masyarakat yang beragama selain Islam sulit untuk mendapatkan KTP di Surabaya.

Dengan demikian unsur penyiaran berita atau pemberitaan bohong dapat di buktikan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan di Kota Surabaya masyarakat yang beragama selain Islam selalu dipersulit untuk mendapatkan KTP.

3) Unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat.

Dalam unsur ini terdakwa melakukan perbuatan yang diketahuinya dapat berakibat kekacauan di masyarakat. Yang dimaksud dengan arti kata keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya.⁷ Keonaran yang terjadi dalam kasus ini adalah dimana masyarakat yang beragama katolik merasa sakit hati setelah terjadinya penodanaan terhadap Hosti/Sakramen Kudus yang dilakukan oleh terdakwa Liauw Tek Hay alias Slamet Hariyadi. Keonaran ini semakin membesar karena massa mengetahui bahwa terdakwa beridentitas KTP beragama Islam sehingga menyebabkan umat Islam yang berada di Kota Bajawa merasa tidak nyaman, dan amukan massa tersebut berujung pada pengrusakan rumah makan Padang yang pemiliknya beragama Islam. Hakim menimbang bahwa tentang unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah mengkehendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan serta

⁷Penjelasan pasal XIV Undang-undang no.1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana

akibatnya, ini berarti bahwa dalam perbuatan terdakwa tersebut adanya sikap batin terdakwa yang menyadari perbuatannya dan akan timbul dari perbuatan yang nyatanya dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dengan demikian unsur kedua dan surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.

b. Pasal 156 huruf a KUHP

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. *yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. *dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

1) unsur barang siapa

Kata barangsiapa itu dapat diartikan lain dan pada orang. Tetapi orang tersebut adalah harus mampu bertanggung jawab dalam arti keadaan jiwa orang atau perbuatan harus normal. Menurut Van Hamel kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat orang itu mempunyai tiga macam kemampuan, yaitu:⁸

- a) Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang dilakukannya.
- b) Mampu untuk menyadari, bahwa tindakan itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- c) Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.

⁸Tongat S.H, M.Hum., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang; Universitas Muhammadiyah, 2008 Hal.205

Majelis Hakim dalam perkara ini berusaha menafsirkan unsur barang siapa dengan menunjukkan kepada subyek hukum yang berfungsi sebagai pelaku siapa saja yang telah melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya, yaitu: “Bahwa tentang unsur kesatu, yaitu barang siapa, dimaksudkan adalah setiap orang atau siapapun yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Bahwa ternyata dalam persidangan ini yang didakwa dan diajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Liauw Tek Hay alias Slamet Hariyadi terdakwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu maka terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.” Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kesatu “barang siapa” dan dakwaan Penuntut Urnum telah terpenuhi.

2) Unsur Dengan Sengaja di muka umum

Mengenai pengertian kesengajaan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan suatu penafsiran resmi atau interpretasi otentik namun demikian dalam praktek peradilan dan doktrin kesengajaan adalah meliputi pengertian sebagai berikut:⁹

- a. Sengaja dengan maksud (*oogmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dan maksud atau tujuan dan pengetahuan dan pelaku artinya pelaku benar-benar menghendaki peristiwa itu terjadi.

⁹E.Y. kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 172.

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*). Di sini yang menjadi kesadaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Pelaku dalam hal ini dipandang telah melakukan tindakan kesengajaan apabila dari perbuatannya itu menimbulkan akibat tertentu yang sebelumnya dapat diperkirakan dengan pasti akan terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Di sini pelaku dianggap melakukan perbuatan atau akibat tertentu apabila dan perbuatannya tersebut dapat diperkirakan kemungkinan akibat yang akan ditimbulkannya.

Unsur dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal 156a KUHP jika dihubungkan dengan perkara No.32/Pid.B/2002/PN. Bajawa, meliputi ketiga corak kesengajaan atau kesengajaan dalam arti luas, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Terdakwa juga mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya akan mengakibatkan keributan dimasyarakat. Berdasarkan hal-hal diatas, maka unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah. Sedangkan kata “di muka umum” dalam ketentuan hukum pidana merupakan suatu keadaan yang membuat pelaku menjadi dapat dipidana, karena jika pernyataan perasaan, permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama tersebut tidak dilakukan di muka umum. maka pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP.

Dapat dipakainya kata-kata “di muka umum” tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum melainkan

cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan itu dapat dilihat oleh publik.¹⁰

Bahwa seperti yang telah terurai di atas terdakwa melakukan penodaan Hosti/Sakramen kudus terjadi saat misa ekaristi kedua di Gereja Santo Yosef Bajawa, tempat tersebut adalah tempat ibadah agama katolik. sehingga diketahui oleh umum. Maka, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dengan demikian unsur kedua dan surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.

3) Unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.

Bahwa cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain, yang dimaksud tindak pidana yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama adalah semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina atau dengan kata lain dikeluarkan ucapan-ucapan permusuhan terhadap suatu agama. Yang dimaksud agama di dalam pasal 156a huruf a KUHP adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia, yakni agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan dan Khong Hu Cu (Confusius).

Sedangkan tata cara atau syarat sakramen adalah tidak semua orang boleh menerima Hosti/sakramen kudus karena seorang katolikpun layak menerima kalau sudah memenuhi tahapan-tahapan komuni pertama/sambut baru bahkan sudah menerima komuni pertama kalau dalam posisi berdosa dia juga tidak layak menerima Hosti/Sakramen Kudus Tubuh Dan Darah Yesus Kristus. Dengan demikian tindakan terdakwa tersebut telah memenuhi

¹⁰P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Bandung: CV. Armico, 196), hal. 464.

unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama.

2. Analisis Penerapan Pasal-Pasal Lain Yang Berkaitan Dengan Perkara No.32/Pid.B/2002

a. Pasal 156 KUHP

Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Negara di Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya atau denda sebanyak rp.4.500,00.

1) Unsur barang siapa

Analisis unsur ini pada umumnya sama dengan analisis unsur barang siapa pasal 156 huruf a KUHP

2) Unsur dimuka Dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia

Pada saat kebaktian/Misa kudus berlangsung terdakwa dengan sengaja dan bertindak secara sadar bahwa dirinya tidak layak dan tidak patut untuk mengikuti kebaktian tersebut, karena terdakwa sendiri tidak mengetahui tata cara peribadatan yang dilakukan, karena peribadatan tersebut bukan ritual agama yang dianut terdakwa yaitu Kong hu cu ataupun (agama Islam) sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dari Terdakwa, seharusnya terdakwa tidak mengikuti acara misa kudus tersebut, sedangkan acara ritual menerima Hostia kudus adalah ritual bagi seorang Nasrani (Umat Khatolik yang sudah menerima Komuni suci pertama, sudah melakukan ritual penguatan Iman Kharisma, atau tidak sedang melakukan perbuatan dosa lainnya, seharusnya Terdakwa mengurungkan niatnya untuk tidak menerima Hostia Kudus tersebut, namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa,

bahkan terdakwa menerima Hostia kudus tersebut dengan sengaja tidak dimakannya, namun terus berjalan keluar pintu gereja. sambil melihat jam tangannya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi-saksi sehingga menimbulkan kebencian dan umat Khatolik pada umumnya dan Umat Khatolik di Kota Bajawa merasa terhina dengan perbuatan terdakwa tersebut, tidak bisa menerima sehingga menimbulkan kebencian kepada golongan, Ras, dan agama tertentu terlebih lebih setelah ditanya oleh beberapa orang pemuda Katholik, terdakwa mengaku beragama Islam, sehingga menimbulkan permusuhan antara agama di kota Bajawa pada saat itu dan kemudian menyebar luas sampai kelapisan masyarakat dan Umat Katholik Kabupaten Ngada pada umumnya, oleh karena itu unsur dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia telah terpenuhi.

b. Pasal 263 ayat (2) KUHP

Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa menggunakann Surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakan mendatangkan sesuatu kerugian

1) Unsur barang siapa

Yang dimaksudkan dengan “Barang siapa“ adalah setiap orang selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya dalam Hal ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa:Liauw Tek Hay alias Slamet Hariyadi kedepan persidangan, halmana telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkannya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi Error In persona, untuk itu menurut hemat Penulis unsur ini telah terbukti.

2) Unsur dengan sengaja memakai surat palsu/dokumen palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah olah benar dan tidak dipalsu.

Pasal 1 ayat (15) undang-undang no.23 tahun 2006 yang berbunyi “Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bahwa terdakwa dengan sadar dan sengaja melaporkan kepada pejabat penerbit Kartu Tanda Penduduk dalam hal ini Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Surabaya, dimana ia mengaku sebagai umat penganut agama Islam, pada hal dia sejatinya beragama Kong Hu Cu, dengan tujuan melancarkan dan mempermudah usaha bisnisnya dan surat/Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut digunakan oleh terdakwa dalam setiap transaksi apasaja yang berhubungan dengan identitas dirinya seolah olah sejati dalam segala usaha dagangnya padahal ia terdakwa tahu bahwa surat tersebut adalah palsu, dengan demikian unsur menggunakan dokumen/surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti.

Bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang digunakan oleh terdakwa inilah menimbulkan penafsiran dari semua pihak khususnya Umat Katholik di Kota Bajawa khususnya dan Kabupaten Ngada pada umumnya, bahwa ada seorang yang berkeyakinan/agama Islam, yang sengaja membuat permusuhan hingga menimbulkan kebencian diantara umat beragama di Kota Bajawa Khususnya dan Kabupaten Ngada pada umumnya, hal ini menimbulkan keresahan antar sesama umat beragama di Indonesia.

C. Analisis Putusan Perkara No.32/Pid.B/2002 Tentang Penodaan Agama Di Nilai Dari Prespektif Keadilan Hukum

Kasus Perkara No.32/Pid.B/2002 merupakan penggabungan tindak pidana/perbarengan (*concursum*), gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus.¹¹

Dari analisis yang dilukan oleh penulis kasus Perkara No.32/Pid.B/2002/PN.Bajawa dengan terdakwa Liaw Tek Hay alias Slamet Hariady, bahwa terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan dari pasal XIV ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1946 tentang peraturan tindak pidana DAN dakwaan kedua melanggar pasal 156 huruf a KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan bentuk dari penggabungan tindak pidana (*concursum*) realis dimana terdakwa melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan yang pertama melanggar pasal XIV ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1946 dimana terdakwa terbukti melakukan perbuatan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan pidana maksimal penjara 10 tahun dan perbuatan yang kedua melanggar pasal 156 huruf a KUHP, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Kewenangan hakim untuk mempertimbangkan dan menghasilkan putusan pemidanaan dengan dasar hukum nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ketentuan pasal 28 ayat (1) "*Hakim wajib menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. dan dalam memperimbangan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa*".

¹¹Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Bandung, PT. Penerbitan Universitas, 1958, hlm. 17

Berdasarkan hasil putusan hakim dalam kasus penodaan agama no.32/PID.B/2002, yang memutuskan bahwa tersangka Liauw Tek Hay alias Slamet Haryadi dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Sehingga analisa hasil putusan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah sebagai berikut: Bahwa kalau penulis mencermati penerapan pasal 156 huruf a KUHP terhadap diri terdakwa dengan penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dilihat dari kacamata hukum sangatlah berat, karena ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana yang terbukti telah melakukan tindak pidana pasal 156 huruf a KUHP adalah pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun penjara.

Bahwa disisi lain menurut hemat penulis penjatuhan putusan tersebut tidak mengacu kepada Pasal 156 huruf a KUHP dimana didalam penerapan dan penjatuhan pidana yang diamanatkan oleh pasal 156 huruf a adalah pidana maksimum bagi pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, oleh karena itu penulis melihat bahwa penjatuhan putusan pada diri terdakwa Majelis Hakim menilai dari berbagai aspek dan sangatlah besar mendengar keterangan saksi-saksi dan aspek keyakinan Umat Katholik pada umumnya dan Masyarakat Kota Bajawa dan Kabupaten Ngada pada khususnya yang menciptakan keyakinan Hakim yang begitu tinggi dalam rangka terciptanya rasa aman, rasa adil bagi umat Katholik di Kota Bajawa dan rasa aman bagi umat yang beragama lainnya sehingga terciptanya rasa keadilan masyarakat dan rasa kedamaian diantara umat beragama;

Bahwa sebagaimana diamanat kan oleh Undang undang bahwa terhadap suatu perbuatan atau kejahatan yang dilakukan dalam satu kesatuan waktu dalam penerapannya akan diambil mana pidana yang terberat bagi diri terdakwa, disini yang terberat adalah pasal 156a KUHP dimana ancaman pidana maksimum 5 (lima) tahun penjara, namun pada kenyataannya terdakwa dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada perkara ini, oleh karena itu

menurut penulis Majelis hakim hanya menilai bagaimana pengaruh/dampak putusan terhadap rasa keadilan masyarakat Bajawa dan Umat Katholik pada umumnya dan mengabaikan rasa keadilan bagi diri Terdakwa. Yang menyatakan bahwa dirinya hanya merindukan Firman Tuhan dan ingin memeluk agama Katholik sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan;

Bahwa inti dari Penulisan dan analisa Penulis bahwa dampak dan manfaat dari Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara pidana nomor.32/Pid.B/2002/ PN. Bjw tanggal 24 Juni 2002 dan penerapan pasal 156 huruf a KUHP terhadap terdakwa:Liauw Tek Hay alias Slamet Hariyadi, adalah telah memenuhi rasa keadilan Masyarakat yang secara tidak langsung menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun disini lain perlu kajian lebih jauh lagi dan mendalam agar hak-hak terdakwa dalam memperoleh perlindungan dan kepastian hukum tidak terabaikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan oleh penulis dalam bab-bab yang terdahulu maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:mengenai analisis terhadap putusan nomor.32/Pid.B/2002 PN.Bajawa, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan ternyata benar terdakwa Liaw Tek Hay alias Slamet Hariady telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat dan dengan sengaja dimuka umum melakukan perbuatan penodaan salah satu agama di Indonesia.Dengan demikian majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Liaw Tek Hay alias

Slamet Hariady dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

2. Unsur-unsur tindak pidana pasal dalam 156 huruf a KUHP:
 - a. Barangsiapa;
 - b. Di muka umum;
 - c. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.
 - d. Bersifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Unsur-unsur pasal XIVayat (1) undang-undang no.1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana:

- a. Unsur barang siapa
- b. Unsur menyiarkan berita atau pemberitaan bohong
- c. Unsurdengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

B. Saran

Saran-saran yang ingin penulis kemukakan ini terutama penulis tujukan kepada mereka yang kompeten dalam mengelola serta membentuk proses terjadinya hukum di negara Indonesia ini, saran-saran itu adalah

1. Putusan akhir yang diberikan hakim kepada terdakwa lebih mendekati asas keadilan yang sebenarnya dan pertimbangan putusan akhir hakim hendaknya dapat memberikan pendidikan bagi terdakwa maupun masyarakat luas untuk tetap bertindak secara hati-hati. Agar peradilan lebih mengedepankan sistem keadilan untuk mencapai hubungan yang adil dan seimbang.
2. Pemerintah harus lebih waspada terhadap munculnya masalah-masalah mengenai keagamaan, karena hal ini dapat menimbulkan konflik dan merusak kerukunan antar umat beragama di Negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Assegaf, *Memahami Sumber Konflik Antar Iman*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 2001.
- Cliffort, Geertz, 1992, *Kebudayaan Dan Agama*, Kanisius, Jogjakarta.
- Dadang, Kahmad, 2002, *Sosiologi Agama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dewantara, Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- E.Y. kanterdan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Juhaya S. Pradjadan Ahmad Syihabudin, 1993, *Delik Agamaa dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung
- Kuswaji, Hermein Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditiya bakti. Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung.
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, CV. Armico, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No.1 tahun 1946 *Peraturan Tindak Pidana*
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)